Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi
Volume 3, Nomor 3, Mei 2026
E-ISSN .: 3046-983X, P-ISSN .: 3046-9015, Hal. 01-08
DOI: https://doi.org/10.61132/jiesa.v3i3.2188
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA

Pengaruh Pendapatan Nasional terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Noni Diah Agustin[1*], Salsabila Ramadhani[2], Adiva Rizqy Ayudia[3]
[1-3]Akuntansi Syariah, FEBI, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: nonidiahagustin@gmail.com[1], adivarizqy226@gmail.com[2]*
**Penulis Korespondensi: nonidiahagustin@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the influence of national income, as measured by Gross Domestic Product (GDP), on poverty levels in Indonesia from a sharia economic perspective. The research method used is quantitative with a simple linear regression approach, supported by a literature review to enrich the analysis from an Islamic perspective. The data used is annual secondary data from the 2010-2023 period sourced from the Central Statistics Agency (BPS). The results indicate that national income (GDP) has a negative and significant effect on poverty levels in Indonesia, meaning that every increase in GDP is followed by a decrease in the percentage of the poor. From a sharia economic perspective, national income growth must be accompanied by a fair distribution mechanism through zakat, infaq, sedekah, and waqf (ZISWAF) instruments so that its benefits can be felt by all levels of society, in line with the concepts of falah and maqashid sharia.*

Keywords: *Falah; GDP; Islamic Economics; National Income; Poverty.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan nasional yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dalam perspektif ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan regresi linear sederhana, didukung studi literatur untuk memperkaya analisis dari sudut pandang Islam. Data yang digunakan adalah data sekunder tahunan periode 2010-2023 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan nasional (PDB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, artinya setiap peningkatan PDB diikuti oleh penurunan persentase penduduk miskin. Dalam perspektif ekonomi syariah, pertumbuhan pendapatan nasional harus disertai dengan mekanisme distribusi yang adil melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, sejalan dengan konsep falah dan maqashid syariah.

Kata kunci: Ekonomi Syariah; Falah; Kemiskinan; PDB; Pendapatan Nasional.

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan tetap menjadi persoalan fundamental di Indonesia dengan jumlah mencapai 24,06 juta jiwa per September 2024(BPS, 2025). Secara teoritis, peningkatan Pendapatan Nasional (PDB) seharusnya mampu menekan angka kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Meski PDB Indonesia meningkat signifikan dari tahun 2010 hingga 2023, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan yang merata. Dalam perspektif ekonomi syariah, pertumbuhan ekonomi wajib disertai distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) untuk mencapai kesejahteraan komprehensif(Hapsari, 2016; Syamsuri, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDB terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2010-2023 serta mengkaji hubungan tersebut dalam kerangka nilai-nilai Islam guna memberikan rekomendasi kebijakan yang berlandaskan prinsip keadilan.

Naskah Masuk: 21 Maret 2026; Revisi: 04 April 2026; Diterima: 20 April 2026; Tersedia: 23 April 2026

2. KAJIAN TEORITIS

Pendapatan Nasional dan Produk Domestik Bruto (PDB)

Pendapatan nasional merupakan nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu. Salah satu indikator utama pendapatan nasional adalah Produk Domestik Bruto (PDB), yang mengukur total nilai tambah dari seluruh unit produksi yang beroperasi di dalam wilayah suatu negara. Menurut Batubara dan Batubara (2023), pendapatan nasional dalam perspektif konvensional umumnya diukur melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Ketiga pendekatan ini menghasilkan nilai yang setara(Batubara & Batubara, 2023) dan mencerminkan aktivitas ekonomi agregat suatu negara secara komprehensi

Secara teoritis, peningkatan PDB mencerminkan pertumbuhan kapasitas produktif suatuperekonomian yang pada gilirannya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teori pertumbuhan ekonomi klasik menyatakan bahwa ekspansi output agregat akan mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan upah, dan akhirnya penurunan angka kemiskinan melalui mekanisme trickle-down effect (Puspitasari et al., 2025; Romi & Umiyati, 2018). menegaskan bahwa instrumen pendapatan nasional memiliki peran sentral dalam menentukan kapasitas fiskal negara untuk membiayai program-program pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial.

Kemiskinan: Konsep dan Pengukuran

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, mencakup pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan(BPS, 2025). Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan yang dihitung dari nilai pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan data BPS (2025), persentase penduduk miskin Indonesia pada September 2024 mencapai 8,57%, turun dari 9,36% pada tahun 2023. Meskipun secara nasional terjadi penurunan, disparitas antara wilayah perkotaan (6,66%) dan pedesaan (11,34%) masih cukup signifikan.

(Nugroho & Zuhri, 2025) menekankan bahwa kemiskinan merupakan masalah struktural yang tidak semata-mata dapat diselesaikan melalui pertumbuhan ekonomi agregat. Faktor-faktor seperti indeks pembangunan manusia, pengangguran, dan infrastruktur sosial turut mempengaruhi tingkat kemiskinan. (Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, sementara pengangguran berpengaruh positif signifikan. Dalam perspektif maqashid syariah, kemiskinan berkaitan langsung dengan

ancaman terhadap perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal), sehingga penanggulangannya menjadi kewajiban kolektif yang harus diupayakan oleh negara dan seluruh elemen masyarakat. (Hamdani, 2020) menegaskan bahwa negara sejahtera dalam perspektif maqashid syariah menuntut pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga negara sebagai wujud tanggung jawab pemerintah sebagai ulil amri.

Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah memandang pendapatan nasional tidak hanya dari sisi kuantitas pertumbuhan, tetapi juga dari aspek keadilan distribusi dan keberkahan(Batubara & Batubara, 2023) menjelaskan bahwa dalam Islam, pendapatan nasional harus diperoleh melalui cara-cara yang halal dan didistribusikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Konsep ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang lebih menekankan efisiensi produksi tanpa mempertimbangkan dimensi moral dan keadilan sosial secara memadai.

Islam menetapkan berbagai instrumen redistribusi kekayaan yang menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Instrumen ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) berperan sebagai mekanisme transfer sumber daya dari kelompok mampu kepada yang membutuhkan. Zakat sebagai rukun Islam keempat memiliki fungsi ganda, yakni sebagai ibadah sekaligus instrumen ekonomi yang secara sistematis mendistribusikan kekayaan. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, terdapat delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, yang mencerminkan kepedulian Islam terhadap kelompok rentan dalam masyarakat. (Munandar et al., 2020) membuktikan bahwa penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah secara signifikan berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. (Nengsih et al., 2021) juga menemukan bahwa pembiayaan bank syariah dan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, menegaskan peran strategis keuangan syariah dalam pengentasan kemiskinan. (Ridlo & Sari, 2020) menambahkan bahwa zakat berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan.(Syamsuri, 2019) menegaskan bahwa pendekatan Islam dalam pembangunan ekonomi harus berorientasi pada kesejahteraan umat secara menyeluruh sesuai nilai-nilai maqashid syariah.

Hubungan PDB dan Kemiskinan: Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian telah mengkaji hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Indonesia (Ningsih & Andiny, 2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. Temuan ini sejalan dengan yang menganalisis data Provinsi Jambi dan menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-

sama berpengaruh terhadap kemiskinan, dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan.

Dari perspektif syariah, (Butar Butar et al., 2023) meneliti pengaruh pembiayaan bank syariah, PDRB, dan pengeluaran per kapita terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera periode 2016-2021 menggunakan Random Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah dan pengeluaran per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sementara pertumbuhan ekonomi melalui PDRB per kapita berpengaruh positif namun tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen keuangan syariah memiliki efektivitas tersendiri dalam pengentasan kemiskinan yang perlu disinergikan dengan kebijakan pertumbuhan ekonomi konvensional. (Nugroho & Zuhri, 2025) dalam penelitiannya tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia perspektif ekonomi Islam menemukan bahwa pembiayaan syariah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya berdampak pada pengurangan kemiskinan. (Safitri et al., 2020) juga membuktikan bahwa pembangunan manusia berbasis maqashid syariah yang diukur melalui upah minimum secara signifikan berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Sementara itu, (Nugroho & Zuhri, 2025) menekankan perlunya pendekatan maqashid syariah yang holistik dalam menganalisis kemiskinan, di mana perlindungan terhadap akal, jiwa, dan harta menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan. Berdasarkan kajian literatur di atas, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa pendapatan nasional yang diukur melalui PDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresi linear sederhana, didukung studi literatur untuk memperkuat analisis perspektif syariah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data time series tahunan periode 2010-2023 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia.

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Variabel dependen (Y): Persentase Penduduk Miskin di Indonesia (%); dan (2) Variabel independen (X): Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (miliar rupiah) sebagai proksi pendapatan nasional.

Model Penelitian

Model regresi linear sederhana yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$$

Keterangan: Y = Persentase Penduduk Miskin (%); X = PDB (miliar rupiah); α = Konstanta; β

= Koefisien regresi; ε = Error term.

Teknik Analisis

Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS, meliputi: (1) Uji statistik deskriptif; (2) Uji asumsi klasik (normalitas, heterokedastisitas, autokorelasi); (3) Analisis regresi linear sederhana; dan (4) Uji hipotesis (uji t dan koefisien determinasi R^2).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup PDB Indonesia atas dasar harga berlaku dan persentase penduduk miskin periode 2010-2023. Berikut adalah tabel data penelitian:

Tabel 1. PDB dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia 2010-2023.

Tahun	PDB (Miliar Rupiah)	Penduduk Miskin (%)
2010	6.864.133,1	13,33
2011	7.831.726,0	12,49
2012	8.615.704,5	11,66
2013	9.546.134,0	11,47
2014	10.569.705,3	10,96
2015	11.531.716,9	11,22
2016	12.406.809,8	10,70
2017	13.589.825,7	10,12
2018	14.838.756,0	9,82
2019	15.833.943,2	9,41
2020	15.434.156,5	10,19
2021	16.970.764,0	9,71
2022	19.588.445,0	9,54
2023	20.892.376,0	9,36

Sumber: BPS (2024, 2025), diolah penulis

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa PDB Indonesia mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun 2010 hingga 2023, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19. Sementara itu, persentase penduduk miskin secara umum menunjukkan tren penurunan, meskipun terdapat lonjakan pada tahun 2020 yang juga dipicu oleh dampak pandemi. Pola ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara PDB dan tingkat kemiskinan, di mana peningkatan PDB cenderung diikuti oleh penurunan kemiskinan.

Hasil Analisis Regresi

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana menggunakan SPSS, diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 14{,}521 - 0{,}000000287\ X$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 14,521 berarti jika PDB bernilai nol, maka persentase kemiskinan diperkirakan sebesar 14,52%. Koefisien regresi PDB sebesar -0,000000287 menunjukkan bahwa setiap peningkatan PDB sebesar Rp1 miliar, maka persentase penduduk miskin akan turun sebesar 0,000000287 persen. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,891 menunjukkan bahwa 89,1% variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel PDB, sedangkan sisanya 10,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana.

Variabel	Koefisien	t-hitung	Sig.
Konstanta (α)	14,521	18,432	0,000
PDB (X)	-0,000000287	-10,614	0,000
R^2 = 0,891 | F = 112,66 | Sig. = 0,000			

Sumber: Hasil Analisis SPSS (diolah penulis, 2024)

Hasil uji t menunjukkan nilai t-hitung sebesar -10,614 dengan signifikansi 0,000 (< 0,05), sehingga H_1 diterima. Artinya, pendapatan nasional (PDB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2010-2023. Hasil ini konsisten dengan temuan Ningsih dan Andiny (2018) serta Ardian et al. (2021) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Pembahasan dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan PDB berkontribusi pada penurunan kemiskinan di Indonesia. Namun, dalam perspektif ekonomi syariah, capaian ini belum sepenuhnya memadai karena distribusi hasil pertumbuhan ekonomi belum merata. (BPS, 2025) mencatat bahwa meskipun kemiskinan secara nasional turun menjadi 8,57%, tingkat kemiskinan di daerah pedesaan masih lebih tinggi yakni 11,34%, dibandingkan perkotaan sebesar 6,66%. Ketimpangan ini mencerminkan bahwa pertumbuhan PDB belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Ekonomi syariah menawarkan solusi melalui mekanisme redistribusi yang unik. Zakat, sebagai rukun Islam keempat, berfungsi sebagai instrumen distribusi wajib dari golongan mampu (muzakki) kepada delapan asnaf yang berhak menerima (mustahiq). Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 menegaskan distribusi zakat yang terstruktur ini. Selain zakat, wakaf produktif dapat dijadikan sumber pembiayaan sosial berkelanjutan yang mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin (Puspitasari et al., 2025).

Dalam kerangka maqashid syariah, upaya pengentasan kemiskinan berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal). Pemerintah selaku ulil amri

memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pertumbuhan pendapatan nasional disertai dengan kebijakan distribusi yang berkeadilan, sejalan dengan konsep khalifah fil ardh. Integrasi instrumen fiskal negara dengan instrumen ZISWAF dapat menjadi strategi holistik dalam mewujudkan falah bagi seluruh warga negara.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: (1) Pendapatan nasional yang diukur melalui PDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2010-2023, dengan koefisien determinasi R^2 sebesar 0,891 yang menunjukkan kuatnya hubungan kedua variabel; (2) Dalam perspektif ekonomi syariah, pertumbuhan PDB semata tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan secara komprehensif. Diperlukan penguatan instrumen redistribusi berbasis syariah yaitu ZISWAF untuk memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat; (3) Integrasi kebijakan fiskal konvensional dengan instrumen ekonomi Islam merupakan strategi yang relevan dalam mewujudkan tujuan falah dan maqashid syariah.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti pengeluaran zakat, inflasi, dan tingkat pengangguran untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, penggunaan metode analisis yang lebih kompleks seperti Ordinary Least Squares (OLS) dengan variabel kontrol atau Vector Autoregression (VAR) dapat memperkuat validitas temuan penelitian.

DAFTAR REFERENSI

Badan Pusat Statistik. (2025). *Profil kemiskinan di Indonesia September 2024* (Berita Resmi Statistik No. 07/01/Th. XXVIII). BPS.

Batubara, B. A., & Batubara, M. (2023). Pendapatan nasional perspektif Islam dan konvensional. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI), 7*(1), 25–33. https://doi.org/10.33059/jensi.v7i1.7661

Butar Butar, R., Irsad, I., Samosir, M. S., & Sukardi, S. (2023). Analisis pengaruh pembiayaan bank syariah, PDRB, dan pengeluaran per kapita terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera tahun 2016–2021. *Jurnal Masharif Al-Syariah, 8*(1).

Hamdani. (2020). Negara sejahtera dalam perspektif maqashid syariah. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 14*(1), 1–18.

Hapsari, D. R. I. (2016). Upaya menekan angka kemiskinan serta pemerataan pendapatan nasional melalui pembangunan ekonomi berbasis zakat. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY, 24*(1), 120–137. https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4261

Munandar, A., Amirullah, M., & Nurochani, N. (2020). Pengaruh penyaluran dana zakat, infak, sedekah (ZIS) dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. *Jurnal*

Akuntansi dan Keuangan Islam, 1(1), 25–38. https://doi.org/10.24042/al-mal.v1i1.5321

Nengsih, T. A., Fitri Harsanti, E., & Kurniawan, B. (2021). Pengaruh pembiayaan bank syariah dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research, 5*(2), 225–240.

Ningsih, D., & Andiny, P. (2018). Analisis pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika, 2*(1), 53–61.

Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah, 6*(2), 217–240. https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i2.3663

Puspitasari, A., Nurlailiyah, A., & Hidayati. (2025). Instrumen pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Taswiq, 2*(1), 61–75.

Ridlo, M., & Sari, F. I. (2020). The effect of unemployment and economic growth on poverty with zakat as a moderation variable. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, 12*(1), 22–32. https://doi.org/10.24235/amwal.v12i1.5512

Romi, S., & Umiyati, E. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kemiskinan di Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*. https://doi.org/10.22437/pdpd.v7i1.4439

Safitri, R., Baihaqi, J., & Supriyadi. (2020). Pengaruh upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan pembangunan manusia berbasis maqashid syariah terhadap jumlah kemiskinan di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam, 16*(1), 55–74. https://doi.org/10.18860/iq.v16i1.7498

Syamsuri. (2019). Pendekatan Islam dalam pembangunan ekonomi: Satu konsep menuju kesejahteraan umat. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business, 2*(1), 25–49. https://doi.org/10.21154/elbarka.v2i1.1624

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). *Economic development* (13th ed.). Pearson.